

PRAKTIK PENGUNGKAPAN INFORMASI *ENVIROMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Yanuar Ramadhan^{1*}, M Rais Arifin², Emma Sinaga³, Alma P Talaohu⁴, Nency Lisbeth⁵
Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
[yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id^{1*}](mailto:yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id)

Manuskrip: Juli -2023; Ditinjau: Juli: -2023; Diterima: Juli-2023; Online: Oktober-2023;
Diterbitkan: Oktober-2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendefinisikan praktik penyediaan informasi *environment, social and governance* (ESG). Metode penelitian dengan menggabungkan strategi tinjauan literatur dengan metodologi penelitian kualitatif. Banyak publikasi dan jurnal dari studi sebelumnya tentang dampak pengungkapan *environment, social and governance* (ESG) terhadap kinerja perusahaan menjadi sumber data studi. Temuan penelitian tinjauan literatur menunjukkan bahwa adopsi praktik pengungkapan informasi *environment, social and governance* (ESG) akan meningkatkan nilai kinerja perusahaan dan meningkatkan reputasi baiknya dari waktu ke waktu, menarik minat investor untuk berinvestasi dan pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Kata Kunci: *Enviroment, Social, Governance*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and define the practice of providing environmental, social and governance (ESG) information. The research method combines a literature review strategy with a qualitative research methodology. Many publications and journals from previous studies on the impact of environmental, social and governance (ESG) disclosures on company performance are sources of study data. The findings of the research review of the literature indicate that the adoption of environmental, social and governance (ESG) information disclosure practices will increase the value of a company's performance and improve its good reputation over time, attract investors to invest and ultimately affect the survival of the company.

Keywords: *Enviroment, Social, Governance*

I. PENDAHULUAN

Tantangan lingkungan, sosial, dan tata kelola baru-baru ini menjadi pusat perhatian bagi banyak bisnis. Berbagai dampak merugikan yang ditimbulkan oleh aksi korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat luas telah meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik diterbitkan oleh pemerintah sebagai sarana untuk membantu dunia usaha dalam menerapkan pengungkapan pelaporan berkelanjutan sebagai respon terhadap lingkungan tersebut, sosial dan masalah tata kelola perusahaan (Keuangan, 2018).

Keuangan berkelanjutan menjunjung tinggi komitmen untuk mengurangi dampak perubahan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tujuannya diubah dari memaksimalkan keuntungan menjadi memaksimalkan peningkatan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta tata kelola perusahaan untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai catatan upaya bisnis (Laporan Berkelanjutan). Dengan membina keselarasan antara masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, penggunaan laporan keuangan yang berkelanjutan berusaha untuk memastikan stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan investasi berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) juga berkontribusi pada pengetahuan tentang tantangan lingkungan, sosial dan tata kelola ini. Investasi yang memasukkan komponen keberlanjutan untuk lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), sering dikenal dengan investasi berkelanjutan. Berdasarkan (Keuangan, 2018), investasi berkelanjutan adalah investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) sebelum memutuskan apakah aspek tersebut memberikan nilai ekonomi bagi suatu perusahaan atau inisiatif bisnis. Bidang sosial dan lingkungan akan diuntungkan dengan pelaksanaan investasi di ketiga bidang tersebut, dan efek timbal baliknya akan lebih baik. Lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) adalah standar yang digunakan oleh bisnis dalam praktik investasi mereka. LST atau ESG menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan konsep lingkungan, sosial dan tata kelola melalui integrasi dan penerapan kebijakan perusahaan (Stobierski, 2022). Pengungkapan informasi lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) merupakan komponen *corporate social responsibility* (CSR) dalam bisnis dengan fokus utama pada ketiga bidang tersebut. Investor dan pemangku kepentingan mengkhawatirkan perlunya pengungkapan keberlanjutan melalui pengungkapan informasi lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) karena LST adalah tanda seberapa baik kinerja perusahaan.

Sebagai tanggapan, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru yang disebut IDX ESG Leaders (ESGL). Saham-saham dalam indeks ESGL memiliki peringkat ESG yang tinggi, bebas dari masalah atau situasi yang kontroversial, serta memiliki likuiditas dan kinerja keuangan yang kuat (Afifah & Rosdiana, 2018). Dengan dirilisnya indeks baru ini, BEI ingin memperluas jangkauan rekomendasi yang diberikan kepada investor untuk investasinya. Investor mengantisipasi pengembalian timbal balik atas investasi mereka sebagai akibat dari tren investasi berbasis ESG ini. Investor akan mendapat untung dari dividen dan keuntungan modal antara lain. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Pada rapat pemegang saham tahunan, semua pemegang saham memberikan suara pada proses pembagian dividen. Keuntungan modal, di sisi lain adalah pendapatan dari selisih harga antara harga beli dan jual saham.

Berdasar temuan survei dari KPMG (2017), yang dicoba dengan memakai *Global Reporting Initiative (GRI) reporting framework*. Ada kenaikan yang bermakna pada angka pengungkapan informasi finansial keberlanjutan, ialah sebesar 41,5% semenjak tahun 2008, dengan persentase sebesar 53% di tahun 2008 serta 75% ditahun 2018. Ini

membuktikan kalau kian banyak industri yang mulai merasa akan bernilainya peran industri dalam melindungi penilaian sosial serta lingkungan, guna senantiasa menjaga nama baik industri dan memperoleh keyakinan dari publik.

Meski demikian, pencantuman standar lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) oleh divisi bisnis perusahaan belum mengakibatkan pengadopsiannya dilakukan secara ideal dan seragam. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku usaha di Indonesia yang belum memahami pentingnya penerapan standar pelaporan berkelanjutan dan pengungkapan data LST secara terbuka kepada publik. Praktik keterbukaan informasi yang berkelanjutan saat ini dipandang masih dalam tahap awal di Indonesia. *The International Association for Public Participation in Indonesia* (2022) mengklaim bahwa kendala yang harus diatasi inilah yang memperlambat upaya penerapan konsep keberlanjutan di Indonesia. Hambatan-hambatan ini termasuk kurangnya sumber daya dan pemahaman yang tidak memadai tentang praktik-praktik LST, serta tingginya biaya konsultasi tentang berbagai isu terkait manajemen, tata kelola, sosial dan lingkungan (LST).

Oleh karena itu diharapkan pemahaman pemangku kepentingan bisnis dan entitas lain mengenai investasi keberlanjutan akan terus berkembang pesat sebagai hasil dari komitmen untuk melaporkan ESG serta dukungan dan kebijakan dari pemerintah. Karena dampaknya yang menguntungkan bagi bisnis, publikasi informasi LST tidak diragukan lagi akan menarik minat investor yang menggunakan LST sebagai metrik untuk menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap penanaman modal. Selain itu, persepsi publik terhadap korporasi (identitas korporasi) dapat ditingkatkan dengan berbagi informasi LST. Peningkatan citra dan reputasi positif perusahaan akan berdampak pada memenangkan loyalitas perusahaan itu sendiri, yang akan meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Astuti et al., (2018) menjelaskan bahwa kegiatan operasi perusahaan pada perusahaan berskala besar akan membutuhkan biaya yang besar, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan yang lebih besar dari masyarakat. Tekanan ini menuntut perusahaan untuk memperhatikan dan menjaga informasi tentang perusahaan, baik keuangan dan bukan keuangan. Hasil literatur yang dilakukan oleh Maryana & Carolina (2021) pemangku kepentingan dalam organisasi banyak melekat pada perusahaan yang lebih besar, sehingga perusahaan akan lebih cenderung untuk mencari legitimasi yang lebih banyak dari pemangku kepentingan, karena sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dikontrol oleh stakeholder. Agar legitimasi didapat perusahaan maka perusahaan akan mengkomunikasikan aktivitasnya, baik aktivitas tentang produksi, lingkungan dan sosial, serta tata kelola dengan cara mengungkapkan informasi tersebut kedalam sebuah laporan, seperti laporan ESG.

Legitimasi yang ingin dicapai perusahaan, sesuai dengan teori legitimasi yang disampaikan (Otero-González et al., 2021) kalau industri ataupun organisasi terus berupaya supaya kegiatan industri legal dalam beroperasi, dan selaras dengan batas-batas serta norma-norma masyarakat. Laporan ESG ini akan membuat perusahaan lebih transparan dan akuntabel di mata stakeholder, sehingga legitimasi mudah didapat perusahaan. Perusahaan besar juga menjadi sorotan publik, sehingga diperlukan laporan baik keuangan dan non keuangan agar lebih transparan. Perusahaan yang memiliki skala yang semakin besar, membuat perusahaan semakin mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan, seperti ESG. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ESG (Maryana & Carolina, 2021).

Pelaporan ESG terkait erat dengan reputasi, merek, dan citra perusahaan (Ismail & Latiff, 2019), dan milenial menempatkan nilai keberlanjutan yang lebih tinggi daripada nilai lainnya (Smith & Brower, 2012) (Brown & Vergragt, 2016). Manfaat ini seharusnya lebih memotivasi bisnis yang berharap dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka. Misalnya, bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, yang sering berhenti beroperasi dan mengajukan kebangkrutan, akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki situasi keuangan mereka daripada yang tidak. Pembeneran ini sejalan dengan filosofi manajemen kesan, yang memanfaatkan pengungkapan diskresi sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan bisnis (Merkl-Davies & Brennan, 2007) (Leary, M. R., & Kowalski, 1990).

Di sisi lain, bisnis yang berjuang secara finansial mungkin tidak menawarkan pelaporan ESG yang unggul. Mereka bertindak seperti ini bukan karena kurangnya keinginan, melainkan karena mereka kekurangan sumber daya keuangan dan teknis yang memadai. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan sering memiliki akses terbatas ke taktik, yang memaksa mereka menggunakan teknik murah. Menurut teori *Conservation of Resources* (COR), manajemen dalam bisnis yang sedang berjuang berperilaku tidak rasional dan kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja karena takut kehilangan sumber daya (Faisal et al., 2018). Sifat intelektual ini membatasi industri untuk sediakan pemberitaan ESG bermutu tinggi.

III. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan strategi literature review untuk mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan jurnal dari penelitian sebelumnya. Membaca berbagai buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam rangka pembuatan artikel ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan lain-lain, merupakan salah satu bentuk literature review. Tinjauan pustaka dilakukan dengan anggapan bahwa pengetahuan akan terus maju seiring waktu dan teknologi (berakumulasi), dan bahwa peneliti sebelumnya telah melakukan dan meneliti masalah yang diperdebatkan.

Tujuan utama dari strategi tinjauan pustaka adalah untuk menawarkan penelitian baru tentang tema-tema yang penting untuk dipahami oleh para peneliti. Artikel-artikel ini selalu dapat dipublikasikan untuk kepentingan umum serta untuk kepentingan penyelidikan mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan kajian pustaka untuk memperdalam pemahamannya terhadap pokok bahasan pembahasan praktik pengungkapan *environment, social and governance* (ESG) dalam penerapan GCG dengan mengkaji jurnal dan artikel yang relevan sebagai pedoman dan sumber analisis penelitian sehingga artikel disusun.

IV. HASIL PENELITIAN

Lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) adalah tiga aspek penting dari implementasinya. Dimulai dengan lingkungan, ESG mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya energi perusahaan, seperti isu polusi, isu limbah, pemanfaatan sumber daya alam, dan dampak terhadap flora dan fauna di lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar dengan memasukkan pertimbangan lingkungan dalam strategi manajemen risiko perusahaan, maka derajat risiko lingkungan akan berkurang. Partisipasi diperlukan dalam elemen lingkungan ini untuk menilai bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi lingkungan. penerapan ESG pada industri wajib dilandasi dengan komitmen serta pengaplikasiannya pada kebijaksanaan industri. Selaku industri yang sudah mempraktikkan manajemen resiko kepada pandangan area, industri itu mempunyai peluang untuk bisa menelaah balik konsep serta kebijaksanaan perusahaannya pada permasalahan area yang berlangsung.

Hasil dari pelaksanaan penilaian area pada industri ilustrasinya, manajemen limbah yang bagus, manajemen sumber daya alam yang lebih berdaya guna, pemakaian tenaga yang berdaya guna serta terbarukan, serta pembuangan yang berkesinambungan dengan mencermati lingkungan sekitar. Alhasil, komitmen ini hendak membagikan akibat positif pada industri yang mempraktikkan ataupun pada daerah sekitar. Terciptanya situasi area yang bagus, akan berakibat pada keberlanjutan jangka panjang operasi bidang usaha industri. Ini berarti, lewat manajemen resiko dengan mencermati perspektif area yang bagus sehingga kemampuan finansial industri juga hendak lebih maksimal.

Kedua, perspektif sosial dalam ESG ialah wujud atensi industri pada ikatan dengan cara eksternal. Antara lain mencakup, negara, warga, konsumen, penyuplai dan pihak-pihak yang bersangkutan yang lain, yang mempunyai ikatan secara eksternal secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri. Ini pula jadi atensi yang jadi fokus industri lewat perspektif sosial ESG. Terdapatnya aspek-aspek lain dari perspektif sosial ESG pula hendak berakibat pada kemampuan industri. Industri dituntut untuk sanggup menyesuaikan diri dengan permasalahan sosial yang muncul, disaat industri sanggup menyesuaikan diri disaat dihadapkan pada permasalahan sosial, ini akan berakibat evaluasi citra suatu industri.

Kebutuhan untuk berkonsentrasi pada isu-isu sosial sebagai risiko manajemen bisnis seharusnya dimasukkan ke dalam perumusan kebijakan perusahaan. Sebagai perusahaan yang menerapkan ESG atau lingkungan, sosial dan tata kelola misalnya, harus mampu merespon dengan cepat isu-isu dan melindungi hak-hak karyawannya. Pengetahuan tentang hak-hak pekerja adalah hal yang khas untuk diberikan. Jika hak-hak pekerja tidak ditegakkan secara memadai, maka sangat mungkin isu ini akan semakin parah dan meluas hingga mencakup isu-isu kemasyarakatan lainnya. Dalam rangka mengaktualisasikan dan berkomitmen untuk membuat kebijakan bisnis, dimaksudkan bahwa perusahaan akan memimpin dalam fokus pada aspek sosial ESG.

Ketiga, tata kelola ESG korporasi harus memperhatikan cara kerja internal suatu perusahaan dengan mengkaji manajemen atau tata kelolanya yang baik. Pengaruh aksi korporasi, bergantung pada tata kelola manajemen dan kepemimpinan korporasi, menjadi topik diskusi di area ini. Perusahaan harus mempertimbangkan tema-tema seperti budaya perusahaan, pengungkapan informasi, standar perusahaan, kebijakan perusahaan, dan lainnya saat merancang hasil tata kelola mereka. Investor akan menilai perusahaan dengan baik ketika memiliki standar internal yang tinggi, yang akan mendorong mereka untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.

Investor secara alami akan mempertimbangkan tata kelola keuangan perusahaan yang transparan, praktik bisnis yang sah, dan kurangnya pelanggaran hak etis. Namun, investor akan diberikan evaluasi yang buruk, jika perusahaan mengelola operasi yang melanggar hukum, menggunakan sistem manajemen keuangan yang tidak transparan, atau melanggar standar etika. Risiko tata kelola perusahaan mencakup berbagai situasi, termasuk skandal internal, korupsi, pemalsuan data, dan konflik internal lainnya, yang harus diperhitungkan saat membuat keputusan dan mengembangkan peraturan yang tegas.

Pengungkapan area, sosial serta tata kelola perusahaan berakibat pada sumber daya alam serta kesejahteraan area. Dengan terdapatnya permasalahan ini sehingga terciptalah pemahaman hendak bernilainya pengungkapan ESG pada industri. Pengungkapan ESG bisa dimaksud selaku perlengkapan ukur yang timbul dampak akibat dari penerapan area, sosial serta tata kelola yang dijalani industri yang dikemas dalam pemberitaan pengungkapan data. Pengungkapan data ESG ini bisa jadi indikator dalam melaksanakan evaluasi serta pengevaluasian hasil kemampuan industri sepanjang melaksanakan kegiatan operasionalnya dan memahami akibat yang hendak muncul atas ketiga perspektif itu. Pengukuran pada pengungkapan data ESG bisa ditemui dengan memakai GRI Standards.

GRI Standards dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) ini ialah suatu usaha penerapan terbaik yang didalamnya tertata kerangka kegiatan yang mencakup peliputan akibat ekonomi, area serta sosial pada masyarakat lewat standarisasi yang diakui secara internasional.

Definisi pelaporan keberlanjutan yang diadopsi oleh *Global Reporting Initiatives* adalah salah satu definisi (GRI) yang paling umum digunakan. Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi yang merinci dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasinya, menurut situs web resmi GRI. Laporan ini juga membahas prinsip-prinsip perusahaan dan tata kelola perusahaan, serta bagaimana strategi bisnis dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan saling terkait. Akan lebih mudah bagi bisnis untuk mengukur dan menyampaikan situasi ekonomi, sosial dan lingkungannya dengan membuat laporan keberlanjutan, memberikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar (Global Reporting Initiative, 2016, p.3). Beberapa bisnis, terutama yang menawarkan jasa keuangan, telah mulai menerapkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Hanya lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik yang wajib mengungkapkan laporan keberlanjutan setiap tahun sesuai dengan peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017.

Sejak tahun 1997, *Global Reporting Initiatives* (GRI) nirlaba telah menjadi pemimpin dalam pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Dengan anggota profesional dari seluruh dunia dan koneksi langsung ke berbagai sektor industri, GRI adalah organisasi independen. Tujuan utama GRI adalah mengedukasi bisnis tentang manfaat pelaporan keberlanjutan sehingga dapat mendukung kelangsungan ekonomi global. Tujuan GRI adalah untuk meningkatkan kesadaran bisnis akan nilai pelaporan ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik (GRI, 2022). GRI telah menetapkan peraturan untuk pengungkapan ESG dalam pelaporan keberlanjutan, dan Dewan Standar Keberlanjutan Global membuat indeks (GSSB).

Pada finansial berkepanjangan industri tidak cuma melaksanakan usaha untuk meningkatkan kemampuan finansial berkepanjangan tetapi pula mensupport kenaikan energi saing supaya bisa terus bertahan dalam mengalami resiko. Pengembangan ini dimaksudkan buat membuka bawah atas pandangan kalau sustainable finance merupakan suatu kesempatan terkini yang disisi lain ialah tantangan untuk industri, alhasil membuka peluang untuk industri ataupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) supaya bisa tumbuh dengan maksimal. Sebaliknya untuk kenaikan kemampuan finansial dalam kondisi pasar modal bisa dicoba dengan membuat indikator saham berlandas pada area hidup (Green Index) semacam indikator ESG yang dikeluarkan oleh BEI, dan industri bisa memasukkan perusahaannya pada go public yang ramah area (green list). Indikator saham yang ramah area hendak berakibat pada menaiknya nama baik ataupun sebutan baik dari sesuatu industri, ini hendak berakibat pada keringanan dalam mendapatkan pendanaan sekaligus bisa mendesak koreksi manajemen area serta sosial sekitar.

Situasi implementasi ESG di Indonesia belum lama ini pula kian pengaruhi para penanam modal dalam mengambil ketetapan. Para penanam modal jadi kian terpikat pada atensi kemampuan air serta tenaga, dan pada gedung yang lebih berdaya guna serta kuat lama. Bersumber pada riset Adams & Abhayawansa (2022), perihal pemodal ESG di tengah endemi, industri dengan tingkatan ESG yang besar mendapatkan pengembalian saham yang relatif lebih besar serta hadapi volatilitas yang lebih kecil. Bersumber pada Survey Nasional ESG (2019), kebanyakan industri di Indonesia belum mempraktikkan pengungkapan ESG dengan cara tertata dalam pengumpulan ketetapan pada perusahaannya. Deni Daruri, selaku pengagas Bumi Internasional Karbon Foundation melaporkan jika, aplikasi ESG Indonesia masih di dasar 50%.

Perihal ini menimbulkan Indonesia tumbang dibandingkan negara-negara lain. Statement ini dibantu oleh informasi Corporate Knights, ESG pasar modal Indonesia pada tahun 2019 terletak di tingkatan 36 dunia, sebaliknya untuk negeri Filipina di tingkatan 30, Malaysia di tingkatan 22, serta terlebih lagi Thailand yang terletak di tingkatan 9. Kedepannya diharapkan, terdapatnya sokongan penuh dari negara terpaut pelaksanaan penerapan pengungkapan ESG. Misalnya, untuk industri yang mempraktikkan ESG hendak diberikan bermacam faedah, semacam insentif pajak. Tercapainya pemerataan penerapan ESG yang membidik pada pembangunan berkepanjangan memerlukan kedudukan seluruh entitas yang bersangkutan, tidak cuma negara, tetapi pula kedudukan warga serta para pelaksana kebutuhan bidang usaha.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pengungkapan data *environment, social and governance* (ESG) jadi salah satu strategi yang positif untuk diaplikasikan pada industri, sebab pengungkapan data ini dibutuhkan guna membuat sesuatu penilaian industri dalam bentuk perhatian serta peningkatan pemahaman kepada area sosial serta tata kelola sekitar. Ini menghasilkan *environment, social and governance* (ESG) selaku perlengkapan untuk industri guna mendapatkan sesuatu legalitas dari warga ataupun stakeholders, dimana perihal tersebut hendak memunculkan reaksi positif di publik dengan pemberian keyakinan atas pemakaian produk industri, serta pula keyakinan dikala hendak memasukkan modalnya pada industri. Kedepannya diharapkan terdapatnya sokongan penuh dari negara, warga, ataupun industri para pelakon bidang usaha terpaut penerapan ESG, alhasil terlaksana pemerataan aplikasi ESG yang berakibat pada terciptanya pembangunan berkesinambungan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A., & Abhayawansa, S. (2022). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation' of sustainability reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 82, 102309–102321. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>
- Afifah, K. N., & Rosdiana, Y. (2018). Prosiding akuntansi pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan informasi lingkungan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia dan menjadi peserta PROPER pada tahun 2014-2016). *Univesitas Islam Bandung*, 4(1), 188–195.
- Astuti, F. Y., Wahyudi, S., & Mawardi, W. (2018). Analysis of effect of firm size, institusional ownership, profitability, and leverage on firm value with corporate social responsibility (CSR) disclosure as intervening variables (study on banking companies listed on BEI period 2012-2016). *Jurnal Bisnis Strategi*, 27(2), 95–109. <https://doi.org/10.14710/jbs.27.2.95-109>
- Brown, H. S., & Vergragt, P. J. (2016). From consumerism to wellbeing: toward a cultural transition? *Journal of Cleaner Production*, 132, 308–317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.107>
- Faisal, F., Prastiwi, A., & Nur Afri Yuyetta, E. (2018). Board characteristics, environmental social governance disclosure and corporate performance: evidence from Indonesia public listed companies. *International Conference on Governance and Accountability*, 5.
- Global Reporting Initiative. (2016). G3 sustainability reporting guidelines. 3. <http://globalreporting.org/guidelines/2002.asp>
- GRI. (2022). GRI universal standards 2021, frequently asked questions (FAQs). December.

- Ismail, A. M., & Latiff, I. H. M. (2019). Board diversity and corporate sustainability practices: evidence on environmental, social and governance (ESG) reporting. *International Journal of Financial Research*, 10(3), 31–50. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n3p31>
- Keuangan, O. J. (2018). Materi presentasi sosialisasi ACGS 2018.
- KPMG. (2017). *The Road ahead: The KPMG survey of corporate social responsibility reporting 2017*.
- Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1990). Impression Management: A literature Review and Two-Component Model. *Psychological Bulletin*, 107(1), 34–47. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.107.1.34>
- Maryana, M., & Carolina, Y. (2021). The Impact of firm size, leverage, firm age, media visibility and profitability on sustainability report disclosure. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 36–47. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.4941>
- Merkel-Davies, D. M., & Brennan, N. M. (2007). Discretionary disclosure strategies in corporate narratives: Incremental information or impression management? *Journal of Accounting Literature*, Vol. 27, 2007, Pp. 116-196, 27, 116–196.
- Otero-González, L., Durán-Santomil, P., Rodríguez-Gil, L. I., & Lado-Sestayo, R. (2021). Does a company's profitability influence the level of CSR development? *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063304>
- Smith, K. T., & Brower, T. R. (2012). Longitudinal study of green marketing strategies that influence millennials. *Journal of Strategic Marketing*, 20(6), 535–551. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2012.711345>
- Stobierski, T. (2022). What is sustainable investing? <https://online.hbs.edu/blog/post/sustainable-investing>